

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI
TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN PADA BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR**

Disusun Oleh:

AUNILAH AZZAHRAH

4519013048



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Nama Mahasiswa : Aunilah Azzahrah

Stambuk/NIM : 4519013048

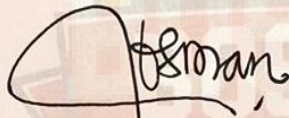
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

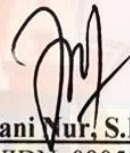
Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0904017302

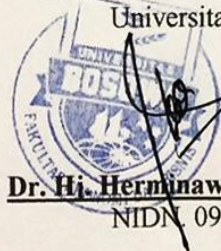
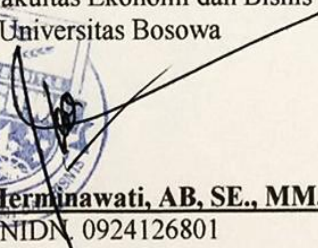


Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si.
NIDN. 0905097702

Mengetahui Dan Mengesahkan:


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

Dr. Hj. Herminawati, AB, SE., MM.
NIDN. 0924126801

Ketua Program Studi
Akuntansi



Thanwain, SE., M.Si
NIDN. 0930016801

Tanggal Pengesahan: 06 September 2023

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aunilah Azzahrah

NIM : 4519013048

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Judul : Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pertanyaan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 28 Mei 2023



Aunilah Azzahrah

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
TATA KELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR**

Oleh:

AUNILAH AZZAHRAH

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa

ABSTRAK

AUNILAH AZZAHRAH. 2023. Skripsi. Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar dibimbing oleh Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK,CA dan Indrayani Nur S.pd., SE., M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan system informasi akuntansi dengan tata kelola keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar sudah sesuai dengan standar atau belum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam kepada beberapa informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan system informasi akuntansi tata kelola keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan dengan pusat akuntansi telah dilaksanakan dan sesuai dengan system pembukuan yang ada yaitu sistem SMILE. Dengan diterapkannya sistem SMILE akan memudahkan dalam mengatur dan mengelola keuangan organisasi.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan

***ANALYSIS APPLICATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS
TO FINANCIAL GOVERNANCE AT THE LABOR SOCIAL SECURITY
ADMINISTERING AGENCY MAKASSAR BRANCH***

By:

AUNILAH AZZAHRAH

Prodi Accounting Faculty Of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

AUNILAH AZZAHRAH. 2023. Skripsi. Analysis Application Of Accounting Information Systems To Financial Governance At The Labor Social Security Administering Agency Makassar Branch guided by Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK,CA and Indrayani Nur S.pd., SE., M.Si.,

The purpose of this study was to find out and analyze whether the application of accounting information systems with financial governance at the Makassar Branch of the Employment BPJS was in accordance with the standards or not. The Research method used in this research is qualitative research with an in-depth interview approach to several informants.

The results of this study indicate that the application of the accounting information systems for financial governance at BPJS Employment with an accounting center has been implemented and is in accordance with the existing bookkeeping system, namely the SMILE system. The implementation of the SMILE systems will make it easier to organizational finances.

Keywords: Accounting Information System on Financial Governance.

KATA PENGANTAR

Untaian puji dan syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran ALLAH SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini:

1. Pertama-pertama, ucapan terima kasih ini untuk keluargaku tercinta, terutama kedua orang tuaku, Bapak Irwan dan Ibu St. Nurlina S serta adik saya Amelia Septiana, atas segala curahan doa, motivasi dan dukungan sehingga penulis sampai pada titik ini.
2. Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si.
3. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.SI selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Bapak Thanwain, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.

6. Kepada Bapak Dr. Firman Menne, SE, M.Si, AK, CA dan Ibu Indrayani Nur, S.Pd., SE., M.Si. sebagai dosen pembimbing pertama dan kedua dengan penuh kesabaran atas waktu dan pikirannya yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, memberi arahan, memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis sehingga menjadi sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
8. Bapak Ishak sebagai Kepala Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar beserta stafnya, atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.
9. Kepala bidang Keuangan Bapak Muhammad Idrus yang bersedia meluangkan waktu guna untuk menyempurnakan penelitian ini.
10. Paling utama teman saya yang paling the best bernama Roynardi Sabta jurusan PWK tetapi selalu setia dan sabar membimbing, membantu dan memberikan segala motivasinya untuk setiap hal dalam aktivitas penyusunan proposal hingga sampai penulisan skripsi ini.
11. Teman saya yang bernama Nur Azizah Achmad, Eriska Kallolangi, dan Musfira yang selalu menemani segala arahan yang diberikan, membantu serta memberi dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan - kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin ya rabbal alamin.

Makassar, 28 Mei 2023

Penulis

Aunilah Azzahrah
4519013048

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Lingkup Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerangka Teori	8
1. Pengertian Sistem	8
2. Pengertian Informasi	10
3. Pengertian Akuntansi	11
4. Pengertian Sistem Informasi	12
5. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi	13
a. Indikator Kualitas Sistem Informasi Akuntansi.....	15
b. Komponen Sistem Informasi Akuntansi	16
6. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi	16
7. Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi	17
8. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	17
9. Tata Kelola Keuangan	18

a. Pengertian Tata Kelola Keuangan.....	18
b. Tujuan Pengelolaan Keuangan	21
c. Manfaat Mengelola Keuangan	23
d. Fungsi Mengelola Keuangan.....	23
10. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	25
11. Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	26
12. Asas Penyelenggara Jaminan Sosial	27
13. Tujuan Penyelenggara Jaminan Sosial	28
14. Indikator Jaminan Sosial	28
15. Prinsip Penyelenggara Jaminan Sosial.....	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	37
B. Informan Penelitian	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Definisi Operasional.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan	41
1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	41
2. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	44
3. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	47
4. Program Badan Penyelenggra Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	47
5. Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	49

6. Job Description	49
B. Hasil Penelitian	51
1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dalam Tata Kelola Keuangan.....	51
2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan	55
3. Standar Laporan Keuangan dalam Tata Kelola Keuangan	57
C. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN	
1. Surat Izin Penelitian	76
2. Surat Telah Menyelesaikan Penelitian	77
3. Dokumentasi Wawancara	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1	Logo Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia di mana sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangat diperlukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang apapun. Alasannya karena mengandung sebuah proses untuk melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan benar untuk semua pihak yang membutuhkan. Proses tersebut berkaitan dengan teknologi informasi untuk memajukan usaha atau bisnis. Penggunaan SIA adalah akan memudahkan perusahaan melakukan sebagian besar kegiatan perusahaan. Dengan memberikan informasi yang tepat dan akurat, biaya produksi dapat ditekan dan menjadi lebih efektif dan efisien.

Menjadi unggul dalam persaingan usaha, perusahaan harus memiliki sebuah manajemen yang baik, sistem informasi akuntansi yang baik, menyediakan informasi akuntansi yang baik, dan bisa menyediakan informasi yang cepat untuk para pengguna informasi sebagai alat pengambilan keputusan sehingga tujuan utama perusahaan tercapai, selain itu tujuan umum sebuah perusahaan adalah berorientasi pada laba yang maksimum. Besar

kecilnya suatu laba yang dihasilkan perusahaan akan menjadi tolak ukur prestasi perusahaan tersebut terhadap pengelolaan manajemen yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan dan unggul dalam persaingan berbagai cara dilakukan perusahaan seperti halnya pemanfaatan sumber daya, semua sistem informasi dan teknologi.

Tata kelola adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Tata Kelola Keuangan merupakan sebuah proses manajemen perusahaan, mulai dari perolehan dana hingga bagaimana dana itu dimanfaatkan untuk kemajuan perusahaan. Maka, keuangan perusahaan harus dikelola secara baik.

Berdasarkan Undang-undang No. 3 tahun 1992 Pasal 1 angka 1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Jaminan sosial tenaga kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara yang harus terlaksana secara menyeluruh tanpa memandang strata sosial. Setiap program atau kegiatan dalam upaya melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja serta untuk mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi

nasional. Dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja pemerintah Indonesia mendirikan Perum ASTEK, kemudian bertransformasi menjadi PT. JAMSOSTEK (Persero). Perubahan PT. JAMSOSTEK (Persero) terjadi menjadi PT. BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial yang diberikan dari perusahaan kepada karyawan atau buruh merupakan kewajiban yang harus disesuaikan dengan kebutuhan. Telah menjadi kodrat, bahwa manusia yang telah memiliki keluarga atau berkeluarga mempunyai kewajiban untuk menanggung keluarganya. Maka dari itu, kesejahteraan yang dikembangkan bukan hanya untuk tenaga kerja sendiri, tetapi juga untuk keluarganya.

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial. BPJS Ketenagakerjaan merupakan sebuah jaminan sosial dan proteksi (perlindungan) bagi pekerja Indonesia maupun pekerja asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari PT Jamsostek.

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar Jl. Urip Sumoharjo merupakan sebuah instansi pemerintah yang bertugas untuk mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perlindungan 5 (lima) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi seluruh tenaga kerja dan

keluarganya terus berlanjutnya hingga berlakunya UU. No 24 Tahun 2011. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi bangsa dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pada bidang keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki kendala sistem informasi akuntansi dikarenakan menu reporting (laporan) yang belum terintegrasi secara sempurna. Hal ini membuat penyajian laporan keuangan yang akan dikirim dari kantor cabang ke kantor pusat belum maksimal. Dari uraian diatas dapat diketahui masalah yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Jadi untuk menghindari timbulnya permasalahan seperti masalah belum maksimalnya penyajian laporan keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar dibutuhkan sistem informasi akuntansi pada penerapan SIA dan tata kelola keuangan yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil judul “ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP TATA KELOLA KEUANGAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat disimpulkan rumusan masalah yaitu “apakah penerapan sistem informasi akuntansi sudah sesuai

dengan tata kelola keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah sudah sesuai atau belum penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan membutuhkan hasil penelitian ini, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi perusahaan, pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan, dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan perusahaan mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar.

3. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar.

E. Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan yakni dengan melakukan observasi lapangan langsung dan survei kepada pegawai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar bagian keuangan. Penelitian ini mencakup penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan mendeskripsikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang SIA, Tata Kelola keuangan, Tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Bab ketiga, pada bab menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, lokasi penelitian, informan penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, definisi operasional, jadwal penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Sistem

Menurut Azhar Susanto (2013) di dalam bukunya, “Bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau grup dari sub/ sistem/ bagian/ komponen atau apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu dengan yang lain dan dapat bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Menurut Abdul Kadir (2014) bahwa “Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling terkait atau terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan”. Sistem berfungsi menerima *input* (masukan), mengolah input, dan menghasilkan *output* (keluaran). Input dan output berasal dari luar sistem, atau berasal dari lingkungan sistem itu berada. Sistem akan berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem yang mampu berinteraksi dengan lingkungannya akan mampu bertahan lama, begitu pula sebaliknya.

Menurut Sutabri (2012) bahwa Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu.

Menurut Hutahaean (2014)

“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran yang tertentu. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem.”

Menurut Marimin (2015) Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.

Menurut Bambang Hartono (2017), sistem adalah suatu himpunan dari berbagai bagian atau elemen yang saling berhubungan secara terorganisasi berdasar fungsi-fungsinya, menjadi suatu kesatuan.

Menurut Kristanto (2018) Sistem merupakan kumpulan elemen – elemen yang saling terkait dan bekerja sama untuk memproses masukan (*input*) yang ditujukan kepada sistem tersebut dan mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan keluaran (*output*) yang diinginkan.

Menurut Erawati (2019) sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkumpul guna untuk mencapai sebuah tujuan serta melakukan suatu kegiatan.

Menurut Kurnia Cahya Lestari dalam Arni Muarifah Amri (2020) sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berintraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan.

Dengan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan keterikatan antar elemen dalam suatu hubungan yang saling berkesinambungan untuk memulai masukan, kemudian memproses, dan menghasilkan keluaran dalam mencapai suatu target.

2. Pengertian Informasi

Gordon B. Davis (2012) , Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang.

Menurut *Sutarman* (2012), Informasi adalah sekumpulan fakta (data) yang diorganisasikan dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si penerima.

Menurut *Kelly* (2011), Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi.

Menurut *Anggraeni dan Irviani* (2017) menjelaskan bahwa Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima.

Menurut *Sutabri dalam Trimahardhika dan Sutinah* (2017), Informasi merupakan suatu data yang telah diolah, diklasifikasikan dan diinterpretasikan serta digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut *Barry E. Cushing* dalam (*Fauzi, 2017*) bahwa “informasi menunjukkan hasil dari pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna kepada orang yang menerimanya.

Menurut *Abdul Kadir dalam (Heriyanto,2018)* Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang.

Menurut Fauzi et.al (2019) bahwa Informasi merupakan sebuah data yang sudah diproses atau diolah menjadi sebuah file dalam bentuk paragraf maupun gambar-gambar.

Menurut Tukino (2020) bahwa Informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerima guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan.

Dari pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa informasi memiliki artian sejumlah data yang telah diolah menjadi beberapa pendapat sehingga menghasilkan bentuk manfaat yang dapat menghasilkan keputusan yang diinginkan untuk semua pihak.

3. Pengertian Akuntansi

Akuntansi dalam suatu bisnis maupun perusahaan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu melancarkan tugas dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi serta detail keuangan dalam manajemen perusahaan.

Menurut Sumarsan (2013) “Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan”.

Menurut Badriyah (2015), “Akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini,

maka di-input ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan”.

Menurut Amin W dalam Badriyah (2015), “Akuntansi adalah suatu aktifitas jasa (mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan, menghasilkan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan”.

Menurut Soemarso (2018) Akuntansi adalah sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang menggunakan informasi tersebut.

Menurut Agie Hanggara (2019) mengemukakan bahwa Akuntansi merupakan proses identifikasi, pencatatan dan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan.

Menurut *Weygandt, J. J* dkk (2019), Akuntansi adalah kegiatan mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan transaksi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak yang memegang kepentingan.

4. Pengertian Sistem Informasi

Menurut Sutarman (2012), Sistem informasi adalah Sistem dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Seperti sistem lainnya, sebuah sistem informasi terdiri atas input (data, instruksi) dan output (laporan, kalkulasi).

Menurut Sutabri T dalam (Yanuardi & Permana, 2018) Sistem informasi adalah sistem dapat didefinisikan dengan mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu.

Menurut Edhy Sutanta dalam (Heriyanto, 2018) Sistem informasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan membentuk satu kesatuan, saling berintegrasi dan bekerjasama antara bagian satu dengan yang lainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan (*input*) berupa data-data, kemudian mengolahnya (*processing*), dan menghasilkan keluaran (*output*) berupa informasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun disaat mendatang, mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi, dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan.

Menurut Anjelita & Rosiska, n.d., (2019) Sistem informasi adalah sebuah hubungan dari data dan metode dan menggunakan hardware serta software dalam menyampaikan sebuah informasi yang bermanfaat.

Dari uraian beberapa para ahli informasi dapat disimpulkan sistem informasi adalah berupa proses pengolahan data yang menghasilkan berupa informasi yang berfungsi untuk mencapai tujuan.

5. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Turner, Weickgenannt, & Copeland (2017) Sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data

akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara terperinci dengan mengklasifikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal. Sistem secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu totalitas himpunan bagian-bagian yang satu sama lain saling berhubungan sedemikian rupa sehingga menjadi suatu kesatuan yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Secara garis besar sistem merupakan suatu komponen dan elemen yang saling terintegrasi, komponenen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu.

Menurut *Barry E. Cushing* dalam (Fauzi, 2017) menjelaskan bahwa Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan dari manusia dan sumber sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggungjawab untuk menyediakan informasi keuangan dan juga informasi yang didapat dari pengumpulan dan pengolahan data transaksi.

Menurut *Romney & Steinbart* (2018) Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan.

Menurut Mustika(2018) yang menjelaskan bahwa “sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang dibuat khusus untuk mempermudah kegiatan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan akuntansi.

Menurut Nadya (2019) sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa unruk

menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang dapat menghasilkan informasi data dengan melakukan kegiatan pencatatan, pemrosesan dan pelaporan data-data sehingga memudahkan pengelolaan perusahaan.

a. Indikator Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Indikator sistem informasi akuntansi yang berdasarkan keandalan sebuah sistem yang dapat dikatakan sebagai sistem yang berkualitas menurut *AICPA* (*American Institute of Chartered Publik Accountants*) adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan (*availability*) merupakan sistem yang tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantuman pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan.
2. Keamanan (*security*) merupakan sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi yang akan membantu mencegah penggunaan yang tidak sesuai, pemutar balikan, penghancuran, pengungkapan informasi, software, dan pencurian sumber daya sistem.
3. Dapat dipelihara (*maintainability*) merupakan sistem dapat diubah apabila tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integrasi sistem.
4. Integrasi (*integrity*) merupakan pemrosesan sistem bersifat tepat waktu, dan diotorisasi sebuah sistem dikatakan memiliki integrasi apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara

keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja.

b. **Komponen Sistem Informasi Akuntansi**

Terdapat enam komponen sistem informasi akuntansi menurut (*Romney & Steinbart* (2018), yaitu :

1. Para pengguna yang menggunakan sistem.
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
3. Data yang berisikan tentang organisasi serta kegiatan bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang di dalamnya termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam mengolah sistem informasi akuntansi.
6. Pengendalian internal dan prosedur keamanan guna melindungi sistem informasi akuntansi.

6. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Romney & Steinbart (2018) dalam *Ulfah Salsabila* (2022) mengatakan keenam komponen sistem informasi akuntansi diatas memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya

melakukan penjualan dan pembelian bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang.

- b. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
- c. Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

7. Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018) Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat serta menambah nilai untuk organisasi dengan:

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa).
2. Meningkatkan efisiensi.
3. Berbagi pengetahuan.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (*supply chains*).
5. Memperbaiki struktur pengendalian internal.
6. Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan.

8. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Penerapan sistem informasi akuntansi bagi setiap perusahaan sudah tentu mempunyai tujuan. Pada dasarnya penerapan sistem informasi akuntansi adalah untuk memperlancar proses kegiatan yang ada dalam

perusahaan melalui penyediaan informasi yang tepat guna dan tepat waktu, serta menciptakan pengendalian internal untuk mengamankan harta perusahaan. Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa penciptaan sistem informasi akuntansi tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar dari pada biaya yang dikorbankan. Salah satu tujuan diterapkannya sistem informasi akuntansi yaitu untuk meningkatkan pengendalian internal. Semakin baik pelaksanaan pengendalian internal, semakin baik pula pelaksanaan operasi perusahaan.

9. Tata Kelola Keuangan

a. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut Halim dalam Yoga Pratama & Faizal Fikri (2020) pengelolaan keuangan adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Purba et al., (2021) Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan seperti pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Keuangan juga mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka.

Menurut Anwar (2019) manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari

sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil keuntungan perusahaan. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan.

Menurut Irfani (2020) pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubungan dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan.

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan, kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurusan atau proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi. Pengelolaan sama halnya dengan manajemen, karena pengelolaan dalam sebuah organisasi memerlukan pelaksanaan tanggung jawab manajerial secara terus menerus. Dan tanggungjawab tersebut secara kolektif sering di sebut sebagai fungsi manajemen. Semua perusahaan atau organisasi membutuhkan yang namanya pengelolaan, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan yaitu: Untuk pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi berdasarkan visi dan misi, Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan, sasaransasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan, Untuk mencapai efisien dan efektivitas kerja suatu perusahaan atau

organisasi. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat. Menurut Afifiddin (2010) bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut: Menentukan strategi, Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab, Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu, Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana, Menentukan standar kerja (efektivitas dan efisiensi), Menentukan ukuran untuk menilai, Mengadakan pertemuan, Pelaksanaan, Pengadaan penilaian, Mengadakan review secara berkala, Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Pengelolaan keuangan memiliki peran penting dalam kehidupan sebuah perusahaan. Karena tanpa pengelolaan keuangan yang tepat, sebuah perusahaan tidak dapat menilai, menjaga, serta mengelola aset-aset yang perusahaan tersebut miliki.

Menurut Syarifudin, pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan para pejabat yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban.

Berdasarkan beberapa definisi mengenai pengelolaan keuangan yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dalam kegiatan pengelolaan keuangan tidak terlepas dari kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Untuk lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah kegiatan untuk menetapkan apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang diperlukan, dan berapa banyak biaya, sehingga perencanaan ini dibuat sebelum suatu tindakan dilaksanakan.
- b. Penggunaan meliputi kegiatan berupa pemasukan dan pengeluaran, baik anggaran rutin maupun pembangunan.
- c. Pencatatan atau pembukuan adalah pencatatan berbagai transaksi yang terjadi sebagai implementasi dari penganggaran.
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban berfungsi untuk memeriksa terutama yang ditujukan pada berbagai masalah keuangan meliputi berbagai transaksi- transaksi yang telah dilakukan, apakah transaksi tersebut sesuai dengan pencatatan dan perencanaan anggaran.

b. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Secara umum pengelolaan keuangan memiliki lima tujuan, diantaranya yaitu:

1. Memaksimalkan Keuntungan

Keuntungan perusahaan yang masuk secara stabil tanpa dikelola dengan baik akan membuat perusahaan tidak berkembang dan hanya diam di tempat. Tujuan pertama ini erat kaitannya dengan fungsi manajemen keuangan terkait anggaran. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan biaya anggaran perusahaan, pengelolaan dana yang baik, ataupun investasi.

2. Pengawasan

Manajemen keuangan tak hanya melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan dana, tetapi juga mengontrolnya. Dari pengawasan yang dilakukan, akan ada evaluasi yang akan menjadi bahan perbaikan untuk perusahaan kedepannya. Pengawasan juga dilakukan agar seluruh prosedur yang diberlakukan berjalan sesuai dengan sistem yang telah dibuat.

2. Menjaga Arus Kas Perusahaan.

Tujuan ini sebenarnya adalah tujuan klasik, atau juga disebut dengan ilmu bisnis. Dengan manajemen keuangan, perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, dikarenakan perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perusahaan dengan transparan.

3. Mengurangi Resiko

Mengurangi resiko adalah salah satu tujuan dari manajemen keuangan yang dari awal akan dilakukan perusahaan. Dengan manajemen keuangan yang disusun secara baik, dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi apa yang akan digunakan. Pastinya strategi yang dipilih memiliki resiko kerugian yang kecil.

4. Pengembalian Dana Pemegang Saham

Setiap perusahaan pastinya membutuhkan dana untuk kepentingan pengembangan. Modal yang didapat sering kali bersumber dari seseorang yang disebut pemegang saham. Setelah mendapatkan dana, perusahaan

berkewajiban untuk mengembalikan modal yang didapat tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah dilakukan. Dengan manajemen keuangan yang baik, perusahaan dengan terstruktur dapat membagi keuntungan secara adil antara perusahaan dan pemilik saham berdasarkan ketentuan yang diberlakukan sebelumnya.

c. Manfaat Mengelola Keuangan

Mengelola keuangan merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh setiap orang. Kebutuhan yang kian meningkat akan sehingga menuntut setiap orang untuk terus bekerja keras dalam memperoleh penghasilan. Belum lagi perencanaan masa depan yang memerlukan tabungan dan investasi agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik kedepannya. Berikut ada lima manfaat mengelola keuangan dengan baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Melatih dalam menjalankan pola hidup hemat.
2. Mengurangi stres.
3. Perencanaan masa depan yang lebih baik.
4. Perlindungan dari hal yang tidak terduga.
5. Menghindari dari utang.

d. Fungsi mengelola keuangan

Berikut beberapa fungsi mengelola keuangan dalam perusahaan:

1. Perencanaan (*Planning*)

Manajemen Keuangan berfungsi untuk melakukan perencanaan terkait seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Tidak

peduli dari mana sumber dana tersebut, baik internal maupun eksternal. Perencanaan juga berguna untuk memaksimalkan penggunaan dana dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Ini berarti semua aspek yang membutuhkan dana harus dipikirkan dengan matang oleh seorang manajer keuangan.

2. Alokasi Dana (*Budgeting*)

Selanjutnya bagian manajemen keuangan perlu juga memecah perencanaan satu per satu untuk memastikan jumlah dana yang dibutuhkan masing-masing bagian. Sesuai prinsip ekonomi tentu saja alokasi dana harus dilakukan dengan anggaran yang paling sedikit untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Namun bukan berarti pelit, maksudnya ialah uang yang dialokasikan harus digunakan secara efisien dan hanya untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.

3. Kontrol (*Controlling*)

Adapun fungsi kontrol yang dimana itu bagian manajemen keuangannya harus menjadi orang yang tegas dalam mengontrol seluruh arus keluar masuk kas. Setiap bagian yang ingin masuk meminta dana untuk urusan perusahaan perlu melewati berbagai pengecekan ketat. Hal ini dilakukan agar pengeluaran perusahaan tidak membengkak. Semua tugas kontrol ini memiliki satu tujuan utama yaitu memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang lama.

4. Pemeriksaan (*Auditing*)

Manajemen keuangan memiliki fungsi pemeriksaan yang memastikan semua pengeluaran dana hanya untuk kepentingan perusahaan. Tentu ada banyak kasus dimana beberapa orang dalam perusahaan memanfaatkan dana yang mudah didapatkan. Jika hal ini terus terjadi maka perusahaan bisa mengalami kerugian yang besar. Untuk itulah bagian manajemen keuangan dibentuk. Mereka juga harus menganalisis, meninjau ulang, menimbang, dan menilai pengeluaran yang telah dilakukan.

5. Laporan (*Reporting*)

Fungsi terakhir manajemen keuangan ialah untuk memberikan laporan. Laporan dibuat dari semua analisis, perbandingan, dan penilaian yang telah dilakukan. Pada akhirnya tugas tersebut berguna untuk menyusun laporan keuangan perusahaan. Laporan ini nantinya berguna sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terkait langkah selanjutnya yang harus diambil. Laporan dibuat sedemikian rupa supaya setiap pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dapat mengambil keputusan terbaik.

10. Pengertian Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program yang bila mengacu pada UU No. 4 Tahun 2014 diselenggarakan oleh pemerintah yang bergerak di bidang jaminan sosial yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan kehidupan yang lebih baik kepada masyarakat terkait dalam hal jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden di mana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. Perlindungan yang diberikan berupa: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dengan pengertian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan adalah merupakan badan hukum publik yang memiliki tujuan menjamin dan memberikan asuransi sosial.

11. Tugas dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Mengenai tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdapat pada pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 antara lain sebagai berikut, yaitu :

- a. Tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - 1) Melakukan dan menerima pendaftaran dari calon peserta.
 - 2) Mengumpulkan dan mengelola data peserta.
 - 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
 - 4) Memungut dan mengumpulkan iuran peserta dan pemberi kerja.

- 5) Memberikan informasi kepada peserta.
- 6) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- 7) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.

b. Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

- 1) Menagih pembayaran iuran kepada setiap perusahaan yang mendaftarkan pegawai/karyawan sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 2) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya serta mengenakan sanksi administratif kepada peserta.
- 3) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 4) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.
- 5) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam memenuhi kewajiban.

12. Asas Penyelenggara Jaminan Sosial

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 2 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) diselenggarakan atas beberapa asas yaitu:

- 1) Asas kemanusiaan, yaitu berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

- 2) Asas manfaat, merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efektif dan efisien.
- 3) Asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan asas yang bersifat ideal.

13. Tujuan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Pada umumnya perusahaan yang mengadakan atau memberikan jaminan sosial mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian jaminan sosial adalah (Noviana Noni 2020:28) :

1. Perusahaan menginginkan karyawan dapat bekerja lebih baik.
2. Untuk memenuhi kebutuhan karyawan agar dapat tercapai tingkat produktivitas yang tinggi.
3. Untuk menambah kegairahan kerja dan semangat kerja yang tinggi dari karyawan.
4. Karyawan betah bekerja sehingga turn over karyawan menjadi lebih rendah.

Berdasarkan beberapa tujuan jaminan sosial diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan jaminan sosial adalah untuk memberikan perlindungan sosial bagi pekerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi sehingga menambah semangat kerja yang tinggi agar dapat tercapai tingkat produktivitas yang tinggi.

14. Indikator Jaminan Sosial

Menurut Imam Soepomo (2008), Jaminan sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai

pengganti yang hilang atau berkurang. Dan indikator pengukuran dari jaminan sosial sebagai berikut:

1. Tunjangan Kecelakaan Kerja

Tunjangan yang diberikan untuk perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempatkerja atau sebaliknya.

2. Tunjangan Hari Tua

Tunjangan yang dibayarkan sekaligus oleh perusahaan kepada karyawan yang telah mencapai usia pension dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lain yang ditentukan.

3. Tunjangan Kematian

Tunjangan yang diberikan kepada ahli waris ketika ahli peserta meninggal dunia bukan kecelakaan kerja.

4. Tunjangan Kesehatan

Tunjangan yang diberikan berupa perawatan kesehatan seperti, pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, dan rawat inap.

5. Rasa aman dan Nyaman

Suatu fasilitas yang diberikan perusahaan dalam menunjang pekerjaan dan membuat karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja.

15. Prinsip Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Perlindungan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu asset ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat

beserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial-ekonomi. Perlindungan sosial sebagai bagian dari kebijakan ekonomi makro juga merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang berdimensi luas bagi harkat dan martabat manusia. Dalam pelaksanaannya perlindungan sosial berkaitan dengan kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya. Dengan demikian pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraannya dan ikut serta membiayainya dalam penelitian Daniel Perwira, Alex Arfianto, Asep Suryahadi, dan Sudarno Sumarto (2003).

Adapun pada 9 (sembilan) prinsip yang diselenggarakan berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yaitu:

1. Kegotong-royongan

Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jamaninan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya.

2. Nirbala

Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

3. Keterbukaan

Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta.

4. Kehati-hatian

Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib.

5. Akuntabilitas

Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Profibilitas

Prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kebersertaan bersifat wajib

Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

8. Dana amanat

Bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dan titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

9. Hasil Pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS) dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Bahwa hasil dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan” di antaranya:

1. Nurul Gusmiranda Rajagukguk (2019)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah di BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara terdapat masalah berupa pengelolaan dana tidak sesuai dengan ketentuan dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang didasari oleh Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengalihan Aset PT Jamsostek (Persero) menjadi Aset Program dan Aset BPJS Ketenagakerjaan serta Kegiatan Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua (JHT), Non JHT, dan Biaya PT Jamsostek Tahun Buku 2012 dan 2013 pada BPJS Ketenaga Kerjaan di Jakarta, Jawa Timur, Medan, Jawa Barat, dan Bali.

Tujuan penelitian adalah untuk menguji secara empiris pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku telah ditindak lanjuti temua BPK RI dan dinyatakan selesai terkait pengelolaan dana dan ketentuan yang harus dijalankan melalui surat resmi bernomor 365/S/XX/08/2015 tertanggal 24 Agustus 2015.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini yang sedang diteliti adalah sama-sama membahas tentang mengenai

sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan di BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah tempat penelitian dan metode yang digunakan.

2. Ulfah Salsabila (2022)

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (SMILE) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar.” Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah memiliki kendala sistem informasi akuntansi pada aplikasi SMILE dikarenakan menu reporting (laporan) yang belum terintegrasi secara sempurna. Hal ini membuat penyajian laporan keuangan yang akan dikirim dari kantor cabang ke kantor pusat belum maksimal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem informasi perlindungan pekerja (SMILE) pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif Kualitatif dengan data yang dikumpulkan berupa data primer dengan cara wawancara langsung kepada beberapa informan yang berkompeten dan terkait pada permasalahan yang peneliti lakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi perlindungan pekerja SMILE sudah efektif karena sudah memenuhi

indikator *American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA)*. Namun dalam proses pengoperasian Sistem Informasi Perlindungan Pekerja (*SMILE*) masih mengalami gangguan yaitu pada jaringan atau sistem servenya kurang lancar yang menyebabkan terhambatnya pekerjaan pada penyusunan atau pengelolaan data keuangan dan juga masih ada beberapa kesalahan seperti penyajian data laporan keuangandi cabang belum maksimal termasuk lampiran yang akan dikirim setiap bulan dari kantor cabang ke kantor pusat.

Adapun persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang saat ini sedang diteliti adalah sama sama membahas mengenai sistem informasi akuntansi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti mengenai sistem informasi akuntansi. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah penelitian sekarang meneliti mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan pada BPJS Ketenagakerjaan.

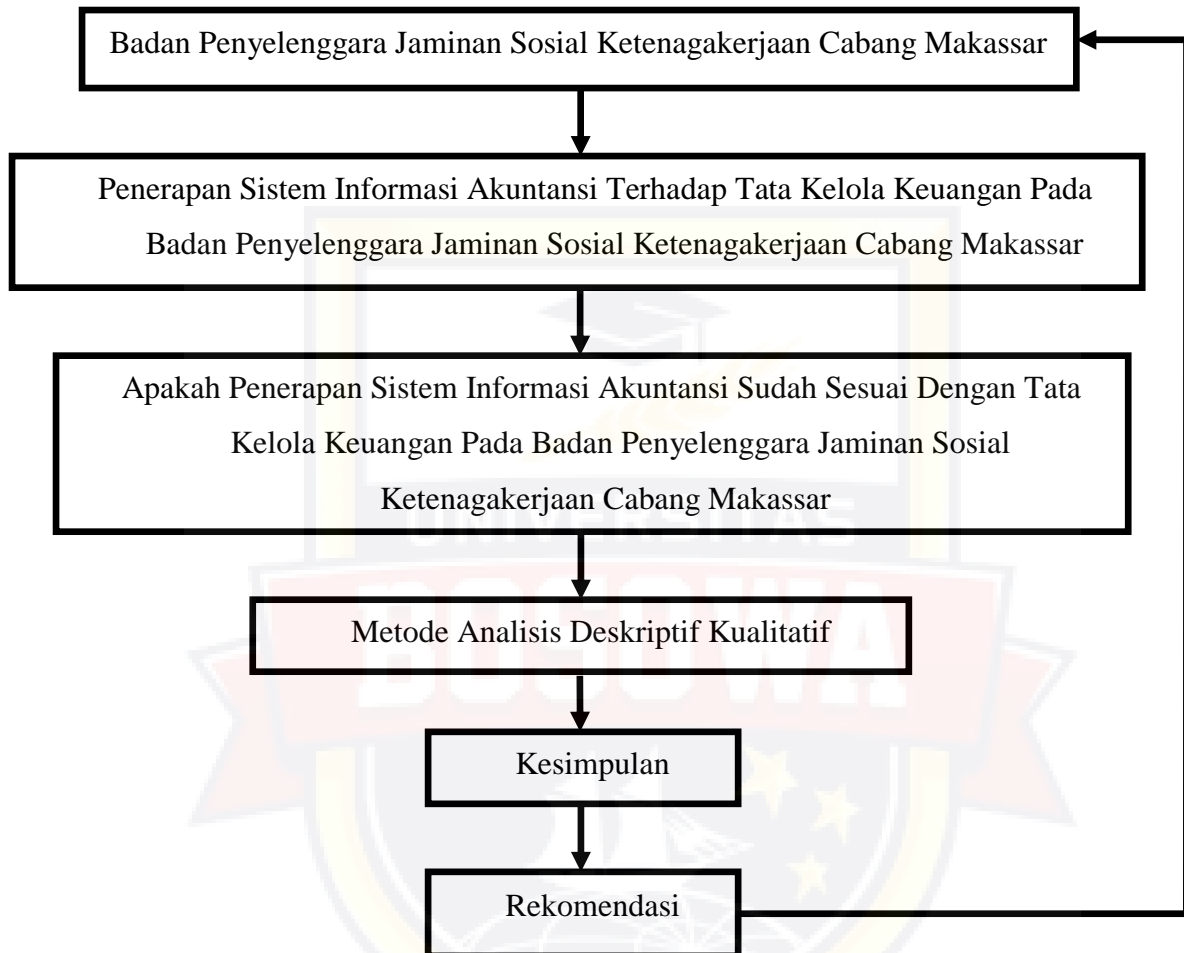
C. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian

lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan atau berkaitan dengan fokus penelitian. Maksud dari kerangka berpikir sendiri adalah supaya terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal (Sugiyono, 2017).

Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan otomatis pengelolaan keuangan semakin baik dan menunjukkan tata kelola keuangan yang baik bagi perusahaan. Maka bentuk kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut.



Kerangka Pikir.**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Sumber: Diolah Sendiri

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Km 4,5, Pampang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

B. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. (Burhan Bungin, 2010).

Umumnya peneliti menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah dengan cara melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan yang berkompeten dan terkait pada permasalahan yang peneliti lakukan yakni kepala bidang keuangan beserta karyawan bidang keuangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan agar jawabannya tidak keluar dari pembahasan dengan alat bantu berupa buku catatan dan perekam suara saat melakukan wawancara di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

C. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode Penelitian berhubungan erat dengan procedure, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. Prosedur, teknik, serta alat yang digunakan dalam penelitian harus cocok pula dengan metode penelitian yang ditetapkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Pengumpulan Data dengan Wawancara (*Interview*) Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

2. Dokumentasi

Sugiyono (2019) mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Contohnya mengamati interaksi dalam proses belajar mengajar, mengamati perilaku suatu komunitas atau masyarakat pada lingkungan tertentu, dan sebagainya.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, sumber data yang digunakan penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara yang dilakukan dengan karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar bidang keuangan mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan .

3. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan yang berkompeten dan terkait pada permasalahan yang peneliti lakukan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penerapan tata kelola keuangan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi pada Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan apakah sudah sesuai. metode analisis deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini definisi operasional variabelnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data akuntansi yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur pula.
2. Tata Kelola Keuangan adalah upaya yang dilakukan sebuah perusahaan dalam merancang kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan serta pengendalian dana dan aset. Mengingat pentingnya pengelolaan keuangan, Anda harus merencanakannya secara cermat.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kantor Cabang Makassar

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan suatu badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja. Dapat dikatakan pula bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial dan ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya Negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja disektor formal.

Sistem informasi akuntansi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar menggunakan sebuah aplikasi yang mengontrol pembayaran, perhitungan, dan pengeluaran kas. Aplikasi yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah aplikasi *SMILE* (Sistem Informasi Perlindungan Pekerja).

Sistem informasi perlindungan pekerja (*SMILE*) adalah informasi perlindungan pekerja yang digunakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan seluruh kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selain itu *SMILE* juga membutuhkan koneksi internet untuk digunakan dan dapat diakses dengan alamat IP (*Internet Protocol*) pada jaringan tertentu.

Aplikasi *SMILE* ini memiliki tujuan untuk pendaftaran kepesertaan, pengolahan klaim ketenagakerjaan, pengolahan administrasi dan keuangan pembayaran, alih kepesertaan, pengecekan status kepesertaan serta digunakan untuk mengelola kegiatan administrasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar memiliki tugas-tugas dan fungsi, adapun tugas-tugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar yaitu melakukan atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja, menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial, membayarkan manfaat atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat. Dan fungsi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar adalah para pekerja nantinya akan mendapat perlindungan atas jaminan sosial seperti Jaminan Hari Tua (JHT),

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Adapun logo Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai berikut:



Gambar 4.1

Logo Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (2023)

Arti logo Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan:

Logo BPJS Ketenagakerjaan menggunakan empat warna berbeda yaitu hijau, putih, kuning dan biru. Penggunaan warna yang lebih beragam ini bukan sekedar agar logo baru ini terlihat lebih menarik. Tapi, dibalik warna-warna tersebut mengandung nilai dan makna filosofis tertentu, yaitu:

a. HIJAU

1. Warna hijau melambangkan kesehjahteraan
2. Warna hijau diharapkan dapat mempersentasikan nilai-nilai pertumbuhan , harmoni, kesegaran, stabilitas dan keamanan.

b. PUTIH

1. Warna putih melambangkan integritas
2. Warna putih diharapkan dapat mempersentasikan kemurnian, kebersihan dan kesempurnaan sebagai simbol kebaikan.

c. KUNING

1. Warna kuning melambangkan optimisme

2. Warna kuning diharapkan dapat mempersentasikan optimisme, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan lebih baik.

d. BIRU

1. Warna biru melambangkan keberlanjutan
2. Warna biru diharapkan dapat merepresentasikan optimisme, pencerahan dan kebahagiaan serta memberi harapan akan masa depan yang lebih baik.

2. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan konisi kemampuan keuangan Negara. Indonesia seperti halnya berkemebang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal. Adapun tugas dan sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketengakaerjaan sebagai berikut :

a. 1947

Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP

No.5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.

b. 1977

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberikerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

c. 1992

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

d. 2004

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

e. 2011

Tahun 2011, ditetapkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

f. 2014

PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, dan JHT

g. 2015

1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 1 Program baru yaitu Jaminan Pensiun sebagai perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia.

3. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Setiap perusahaan pasti memiliki visi misi termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar, adapun visi misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar sebagai berikut:

➤ **Visi:**

Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kebangsaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik serta Unggul dalam Operasional dan Pelayanan.

➤ **Misi:**

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkomitmen untuk :

1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya
2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja
3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional

4. Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Adapun 5 Program yang disediakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu :

1. **Jaminan Hari Tua (JHT)**

Jaminan hari tua (JHT) adalah program Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karna meninggal, cacat, atau hati tua dan diselenggarakan dengan sistem hari tua.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja (JKK) adalah memberikan kompensasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja. Iuran program JKK ini sepenuhnya dibayarkan oleh perusahaan.

3. Jaminan Kematian (JK)

Jaminan kematian diperuntukkan bagi ahli waris dari peserta program Jamsostek yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, tetapi jaminan kematian diperlukan supaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang dan jaminan ini dibayarkan oleh perusahaan.

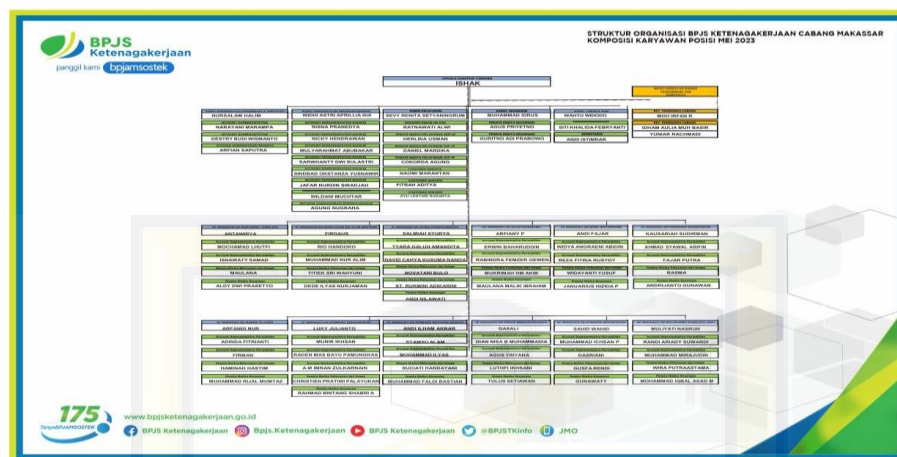
4. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun (JP) adalah jaminan yang akan diterima oleh pekerja yang terdaftar jaminan pensiun di BPJAMSOSTEK jaminan pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnyadengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun.

5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.

5. Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar (2023)

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar

6. Job Description

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar memiliki enam bagian bidang dan mempunyai tugas pada jabatan masing-masing pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

a. Kepala Kantor Cabang

Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan operasional dikantor cabang, selaras dengan kebijakan dan strategi yang ditetapkan dikantor wilayah, guna memastikan pencapaian target cabang dan wilayah secara optimal, sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku diperusahaan dan menyerahkan dan memastikan peningkatan pelayanan kepada peserta.

b. Kepala Bidang Pemasaran

Merencanakan program formal, informal dan khusus (untuk pengembangan kepesertaan) dan pengelolaan kepesertaan melalui program *Customer Relationship Management* (CRM) di cabang yang selaras dengan strategi pemasaran wilayah, memantau dan membina kinerja *Marketing Officer* (MO) dan *Relationship Officer* (RO) serta mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan, guna memastikan target kepesertaan dan iuran di cabang tercapai dengan efektif dan efisien.

c. Kepala Bidang Pemasaran BPU

Melaksanakan kegiatan pemasaran, guna meningkatkan perluasan kepesertaan sesuai target, menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan pemasaran, melakukan pertemuan kelompok serta kunjungan dalam rangka kepesertaan program khusus (sektor informal dan jasa konstruksi), dan menerima pendaftaran proyek dan peserta sektor informal.

d. Kepala Bidang Pelayanan

Merencanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan program JHT, JK, JPK, JKK dan JKP guna memastikan kegiatan pelayanan berlangsung lancar dan memenuhi standar kualitas yang ditentukan.

e. Kepala Bidang Keuangan

Mengkomplikasi usulan anggaran dari setiap bidang dikantor cabang, melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran dan mencatat transaksi yang terjadi, serta memenuhi kewajiban pajak perusahaan, guna

menghasilkan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien serta dipenuhinya kewajiban yang terkait dengan perpajakan.

f. Kepala Bidang Umum dan SDM

Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan sumberdaya manusia, pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan aset dan pelayanan umum bagi pegawai (seperti rumah tangga, kebersihan, keamanan, kearsipan, dan lain-lain), serta hubungan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal, guna memberikan dukungan kepada aspek SDM dan umum bagi kelancaran bisnis dikantor cabang.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teoritis, dan metodologi penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Hasil penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung kepada karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang keuangan terkait dengan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan. Hasil penelitian dihasilkan dari wawancara berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah peneliti siapkan.

1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dalam Tata Kelola Keuangan

Sistem informasi akuntansi sangat memiliki peran atau fungsi dalam mengelola keuangan yang sangat berpengaruh di sebuah perusahaan karena dapat mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti misalnya melakukan penjualan dan pembelian

bahan baku dengan proses yang sering dilakukan secara berulang. Terbukti dengan hasil wawancara dengan karyawan bagian keuangan diantaranya dengan Bapak Muhammad Idrus selaku kepala bidang keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh dan berkaitan dengan bidang lain dan ujung informasi berada di bidang keuangan seperti itu.”

Hal yang sama dikatakan oleh Bapak Agus Priyetno selaku karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya sangat berpengaruh, karena disitu bisa dilihat alur proses bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mulai dari penerimaan iuran, kemudian pembayaran jaminan, dan ada juga pembayaran operasional terkait dengan apa yang dilakukan oleh kantor cabang atau unit itu sendiri.”

Selanjutnya Bapak Guritno Adhi Prabowo selaku karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar bidang keuangan mengatakan bahwa:

“Menurut saya sistem informasi akuntansi berpengaruh dalam mengelola keuangan karena, dimana laporan akuntansi itu atau pembukuan sebuah perusahaan itu tidak baik maka akan sulit untuk menentukan atau pencatatan contohnya pendapatannya karena, perusahaan itu pasti mencari keuntungan, nah informasi akuntansi itu bisa menunjukkan terkait pendapatan itu, seperti itu.”

Berdasarkan dari beberapa pendapat dari informan karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar di bidang keuangan yang mengenai Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dalam Tata Kelola Keuangan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi sangat

berpengaruh dalam tata kelola keuangan karena dapat mengelola laporan keuangan yang mencakup penerimaan iuran, pembayaran jaminan, pembayaran operasional serta pembukuan perusahaan dan sangat berkaitan dengan bidang yang lainnya.

Selain itu adapun beberapa pendapat karyawan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar mengenai sistem informasi akuntansi dalam tata kelola keuangan yang baik.

Menurut Bapak Kepala Bidang Keuangan Muhammad Idrus mengatakan bahwa:

“Tata kelola keuangan perusahaan yang baik itu ada 8 diantaranya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, prediktabilitas, dinamis, profibilitas”

Selanjutnya menurut Bapak Agus Priyetno mengatakan bahwa:

“Sebenarnya sistem informasi akuntansi yang ada khususnya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar itu sudah ada standar yang tertuang di dalam aturan manajemen itu sendiri, jadi yang baik itu yang sudah sesuai dijalankan dengan aturan-aturan yang berlaku dan yang ada di kator Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan seperti itu.”

Adapun juga penjelasan dari Bapak Guritno Adhi Prabowo yang selaku karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa:

“Sistem informasi yang baik di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang menurut saya, secara umumnya biasa dilakukan oleh kepala bidang keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar yang tiap bulannya biasa dibuat strategi-strategi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta apa yang telah dilakukan oleh kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dirangkum menjadi laporan analisis manajemen.”

Berdasarkan beberapa pendapat dari informan dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan sistem informasi akuntansi yang baik itu ada 8 diantaranya seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, prediktabilitas, dinamis, profibilitas serta khususnya di kantor badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan cabang makassar sendiri memiliki standar yang tertuang didalam aturan manajemen itu sendiri sehingga yang tiap bulannya itu dibuat strategi yang dilakukan oleh kantor yang dapat dirangkum menjadi laporan analisis manajemen.

Selanjutnya untuk mengetahui pandangan sistem informasi akuntansi menurut beberapakaryawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bapak Agus Priyetno mengatakan bahwa:

“Menurut saya, sistem informasi akuntansi itu sebuah kumpulan dari beberapa informasi data yang ada dalam satu kesatuan yang membantu perusahaan itu untuk mencapai tujuannya.”

Selanjutnya menurut Bapak Guritno Adhi Prabowo mengatakan bahwa:

“Pandangan saya terhadap sistem informasi akuntansi itu setiap perusahaan wajib untuk memiliki sistem informasi akuntansi karena sistem informasi akuntansi di sebuah perusahaan itu memiliki fungsinya untuk mengontrol atau meminimalisir resiko-resiko yang ada disebuah perusahaan, jadi sistem informasi akuntansi juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan para struktural atau para atasan memangku kepentingan seperti itu.”

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan mengenai pandangan sistem informasi akuntansi bahwa pandangan terhadap sistem informasi akuntansi sebuah informasi data yang memiliki fungsi untuk mengontrol resiko yang ada disebuah perusahaan.

2. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan

Berikut wawancara mengenai penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan bersama Bapak Agus Priyetno selaku karyawan bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa:

“Sejauh ini baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar, karena proses yang ada sendiri di unit kerja ini berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya bisa dilihat dari proses pembayaran jaminan yang tidak ada kendala, keluhan juga dari tenaga kerja yang datang untuk mendapatkan pelayanan juga aman dan informasi yang tersampaikan itu juga tersampaikan dengan baik.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Guritno Adhi Prabowo selaku karyawan bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya tentang penerapan sistem informasi akuntansi dimana saya bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar belum terlalu digunakan, karena di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar tidak mengelola secara utuh pembukuan akuntansi, karena yang melakukan pembukuan akuntansi secara utuh itu ada di kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan adanya peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya dalam proses pembayaran jaminan yang tidak mempunyai kendala apapun.

Selain itu kita juga perlu mengetahui tentang penggunaan sistem informasi akuntansi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat memaksimalkan pekerjaan dalam pengelolaan data keuangan.

Berikut ini wawancara bersama Bapak Agus Priyetno mengatakan bahwa:

“Yang selama ini yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan adanya sistem informasi akuntansi itu akan mempermudah proses bisnis data keuangan dan akuntansi terkait dengan proses pembuatan laporan keuangan, seperti itu.”

Selanjutnya menurut Bapak Guritno Adhi Prabowo mengatakan bahwa:

“Yang saya tau, sistem informasi akuntansi pasti ada digunakan di kantor pusat kami, yang saya tau karna itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan dana di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Jadi, masing-masing programpun kami ada, kebetulan sekarang sudah ada 5 program yaitu JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP. Itu semua masing-masing punya laporan keuangan tersendiri. Jadi, itu pasti sistem informasi akuntansi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu digunakan secara maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya penggunaan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan data keuangan itu sangat mempermudah proses data keuangan dan berjalan secara maksimal.

Selain itu kita juga dapat mengetahui tentang definisi dari tata kelola keuangan.

Berikut wawancara bersama Bapak Agus Priyetno selaku karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa definisi definisi dari tata kelola keuangan sebagai berikut:

“Kalau dari versi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tata kelola keuangan itu adalah seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh keputusan atau hasil yang baik yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.”

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Guritno Adhi Prabowo yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut definisi saya sederhana aja sih, seni dalam mengelola keuangan aja. Seperti itu.”

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa definisi dari tata kelola keuangan yaitu seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh hasil yang baik yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Selain itu kita dapat mengetahui fungsi dari tata kelola keuangan yang ada di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berikut wawancara bersama Bapak Agus Priyetno yang mengatakan bahwa:

“Fungsinya sebagai aturan agar proses bisnis yang ada di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu berjalan dengan baik tidak ada kerugian yang dialami oleh tenaga kerja, karyawan, atau stakeholder lainnya.”

Selanjutnya menurut Bapak Guritno Adhi Prabowo mengatakan bahwa:

“fungsi dan tujuannya itu tergambar dari strategi utama dari kita yang baru itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, jadi dalam mengelola keuangan kita harus efektif dan efisien.”

Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuannya itu sebagai aturan sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan tidak mengalami kerugian serta dalam pengelolaan anggaran kita harus efektif dan efisien.

3. Standar Laporan Keuangan dalam Tata Kelola Keuangan

Adapun standar laporan keuangan tata kelola keuangan yang hasil wawancaranya sebagai berikut.

Berikut wawancara bersama Bapak Agus Priyetno selaku karyawan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Kalau standar laporan keuangan tentunya kita menganut ke SAK, ada buku SAK tau kan, nah jadi kalau dari informasi saja kalau di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu, kita kan ada 5 program kan ada jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelekaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan pensiun (JP), kemudian jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu sendiri, kalau untuk jaminan hari tua (JHT) kemudian jaminan pensiun (JP) itu standar akuntansinya menggunakan PSAK 18, kalau dia JKK, JKM, JKP, dia menggunakan ISAK 35, kalau operasional atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu sendiri menggunakan PSAK 1 entitas umum, seperti itu standarnya.”

Selanjutnya menurut Bapak Guritno selaku karyawan bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan aturan yang berlaku, PSAK dan yang berlaku di Indonesia seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kami simpulkan bahwa standar laporan keuangan yang diterapkan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menggunakan SAK dan PSAK yang berlaku di Indonesia.

Selain itu kita juga dapat mengetahui tentang bagaimana kualitas laporan keuangan yang ada di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berikut wawancara bersama Bapak Agus Priyetno selaku karyawan bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Kualitas laporan keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu sendiri karena ini perusahaan terbesar yang tentunya pasti akan kualitasnya itu akan diuji oleh BPK, ada audit dari eksternal kantor pusat yang besar yang 4 besar, kemudian selain itu, kalau di kantor cabang itu kita akan melaporkan lampiran keuangan itu setiap tanggal 1 ke kantor pusat, seperti itu, jadi kalau dilihat dari kualitasnya pasti sudah baik, karna hasil auditnya pun juga dari eksternal yang dipublish setiap bulan itu alhamdulillah wajar tanpa kecuali atau wajar tanpa modifikasi sekarang, seperti itu.”

Selanjutnya menurut Bapak Guritno Adhi Prabowo selaku karyawan bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, kualitas laporan keuangannya sudah baik, karena setiap tahunnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu di audit oleh kantor auditor independen dan memiliki laporan yang baik wajar tanpa modifikasi.”

Berikut dari hasil wawancara diatas terkait kualitas laporan keuangan dapat kami simpulkan bahwa kualitas laporan keuangannya sudah baik karena yang tiap tahunnya itu diaudit oleh kantor auditor sehingga memiliki laporan yang baik dan wajar tanpa modifikasi.

Selain itu kita juga perlu mengetahui tentang apakah dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat mempermudah tata kelola keuangan dikantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berikan alasannya.

Berikut ini wawancara bersama Bapak Agus Priyetno selaku karyawan bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Adanya sistem informasi akuntansi dengan tata kelola keuangan itu sebenarnya berbanding lurus jadi, dia itu pasti akan mempermudah tata kelola keuangan karena adanya sistem yang diatur dari hulu ke hilir, jadi informasi-informasi terkait akuntansi, jurnal-jurnal, posting, neraca dan laporan itu pasti akan mempermudah tata kelola yang dimana seperangkat atau pedoman ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen itu sendiri atau stakeholder kedepannya, seperti itu.”

Selanjutnya menurut Bapak Guritno Adhi Prabowo selaku karyawan bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mengatakan bahwa:

“Jawabannya iya, pasti alasannya karena, apa ya, informasi akuntansi itu akan mempengaruhi terhadap itu, jadi seorang pimpinan struktural keuangan itu bisa mengambil sebuah keputusan, jadi kalau informasi akuntansi itu dapat mempermudah tata kelola keuangan itu pasti. Seperti itu.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat kami simpulkan bahwa adanya sistem informasi akuntansi sangat mempermudah dalam tata kelola keuangan karena adanya sistem yang diatur sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan manajemen itu sendiri.

C. Pembahasan

Pengelolaan keuangan adalah kegiatan berupa perencanaan, penggunaan, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban dana. Setelah itu peneliti menetapkan 2 informan yaitu, Bapak Guritno Adhi Prabowo selaku karyawan/staff bidang keuangan, dan Bapak Agus Priyetno selaku karyawan/staff bidang keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

Terkait dari hasil wawancara sebelumnya yang dikatakan oleh Bapak Agus Priyetno selaku karyawan/staff bidang keuangan yang mengatakan bahwa dengan adanya penerapan sistem informasi akuntansi di badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan yang sangat mempermudah pengambilan keputusan manajemen karena adanya sistem yang diatur sehingga dapat berjalan dengan baik.

Penerapan sistem informasi akuntansi bagi setiap perusahaan sudah tentu mempunyai tujuan. Pada dasarnya penerapan sistem informasi akuntansi adalah untuk memperlancar proses kegiatan yang ada dalam perusahaan melalui penyediaan informasi yang tepat guna dan tepat waktu, serta menciptakan

pengendalian internal untuk mengamankan harta perusahaan. Suatu hal penting yang harus diperhatikan adalah bahwa penciptaan sistem informasi akuntansi tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar dari pada biaya yang dikorbankan. Salah satu tujuan diterapkannya sistem informasi akuntansi yaitu untuk meningkatkan pengendalian internal. Semakin baik pelaksanaan pengendalian internal, semakin baik pula pelaksanaan operasi perusahaan.

Penerapan tata kelola keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar sudah sesuai dan mengikuti indikator menurut *American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA)* yang memiliki empat indikator kualitas sistem informasi akuntansi yaitu ketersediaan (*availability*), keamanan (*security*), dapat dipelihara (*maintainability*), dan integritas (*integrity*). Berikut penjelasannya:

1. Ketersediaan (*availability*).

Ketersediaan atau *availability* merupakan sistem yang tersedia untuk dioperasikan dan digunakan dengan mencantumkan pada pernyataan atau perjanjian tingkat pelayanan. Dari hasil penelitian ini pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar ketersediaan tata kelola keuangan mempermudah proses bisnis data keuangan dan akuntansi terkait dengan proses pembuatan laporan keuangan.

2. Keamanan (*security*).

Keamanan atau *security* merupakan sistem dilindungi dari akses fisik maupun logis yang tidak memiliki otorisasi yang akan membantu mencegah penggunaan yang tidak sesuai, pemutar balikan, penghancuran, pengungkapan informasi, software, dan pencurian sumber daya sistem. Hasil penelitian pada

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar sudah aman, baik dan wajar tanpa modifikasi.

3. Dapat dipelihara (*maintainability*).

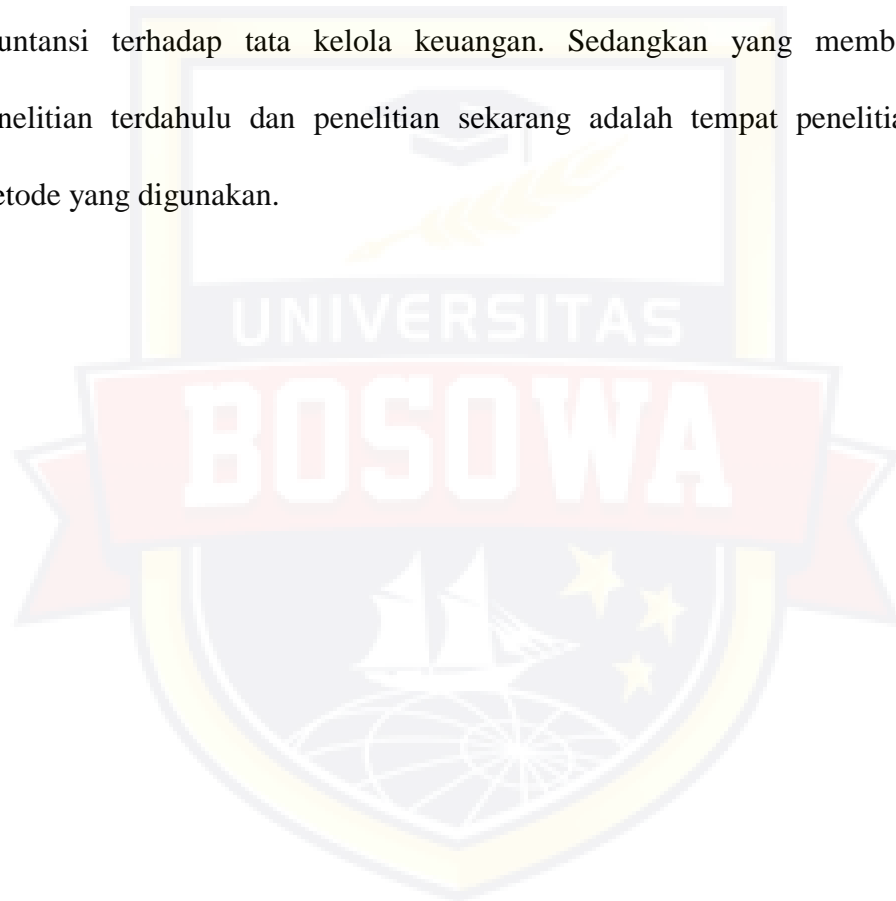
Dapat dipelihara atau *maintainability* merupakan sistem dapat diubah apabila tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan, dan integrasi sistem. karena sistem informasi akuntansi di sebuah perusahaan itu memiliki fungsinya untuk mengontrol atau meminimalisir resiko-resiko yang ada di sebuah perusahaan tanpa mempengaruhi ketersediaan, keamanan dan integrasi sistem.

4. Integrasi (*integrity*).

Integrasi atau *integrity* merupakan pemrosesan sistem bersifat tepat waktu, dan diotorisasi sebuah sistem dikatakan memiliki integrasi apabila dapat melaksanakan fungsi yang diperuntukkan bagi sistem tersebut secara keseluruhan dan bebas dari manipulasi sistem, baik yang tidak diotorisasi maupun yang tidak disengaja. tujuannya itu tergambar dari strategi utama dari direksi yang baru itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran, jadi dalam mengelola keuangan harus efektif dan efisien.

Terkait penjelasan diatas, hasil penelitian ini sudah sesuai dengan indikator *American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA)* dan sejalan dengan penelitian terdahulu yang juga mendukung sistem informasi akuntansi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar yang mengukur dari indikator *American Institute of Chartered Public Accountants (AICPA)* oleh Ulfah Salsabila (2022) dan yang di jelaskan

oleh peneliti terdahulu lainnya yaitu dari Nurul Gasmiranda Ratugukguk (2019), sama-sama membahas tentang mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti mengenai sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan. Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah tempat penelitian dan metode yang digunakan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah dalam penelitian ini adalah tentang penerapan sistem informasi akuntansi yang sudah sesuai dengan tata kelola keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar.

Berdasarkan analisis dan pembahasan atas hasil penelitian pada bab sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan pusat serta akuntansi sesuai dengan pembukuan dan kantor cabang mengikat pada kantor pusat yang menerima sistem informasi akuntansi seperti akuntansi dan keuangan menjadi sesuai dengan sistem yang ada yaitu sistem SMILE.

Dengan adanya sistem informasi akuntansi pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar sangat mempermudah dalam pengelolaan keuangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas penerapan sistem informasi akuntansi terhadap tata kelola keuangan dapat dikemukakan saran sebagai bahan pertimbangan yaitu memperbaiki sistem informasi akuntansi terhadap pengelolaan keuangan agar laporan keuangannya yang akan dikirim ke kantor pusat itu bisa menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir. (2018). *Konsep Dasar Dan Pengertian Sistem*. Article: Universitas Negeri Padang.
- Abdul Kadir (Heriyanto). (2018). *Pengertian Informasi*. <http://journal.unmaha.ac.id>
- Agie Hanggara. (2022). *Pengertian Akuntansi*. article: vol. 2 No.1 : Recuible Accounting Journal.
- Amin W (Badriyah). (2022). *Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Di Unit Perdagangan Koperasi Unit Desa Pakis*. Journal homepage: www.unmer.ac.id.
- Anjelita & Rosiska, n.d. (2019). *Pengertian dan Definisi Sistem Informasi*. Article: unmaha.ac.id.
- Anggraeni & Irviani. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Anwar. (2019). *Pengertian Manajemen Keuangan*. Article: repository.stei.ac.id
- Arpiah, Siti. (2018). *Ini Empat Masalah IT di BPJS Ketenagakerjaan*. <http://www.beritasatu.com/makro/345549-ini-empat-masalah-it-di-BPJS-Ketenagakerjaan.html>,
- Azhar Susanto. (2013). *Pengertian Sistem*. <http://eprints.uny.ac.id>
- Barry E. Cushing (Fauzi). (2023). *Proses Integrasi Sistem Informasi Akuntansi Perhitungan Markup Price pada Bisnis Omni Channel (Studi Kasus pada PT. Karya Hasta Dinamika (Kalbe E. Health)*. Jakarta: <http://eprints.kwikkiangie.ac.id/id/eprint/4222>.
- Barry E. Cushing. (Fauzi). (2017). *Pengertian Informasi*. <https://repository.bsi.ac.id>
- Badriyah. (2021). *Pengertian Akuntansi*. Article.: univer sitas Bina Darma.
- Bambang Hartono. (2017). *Pengertian Sistem*. <https://repository.usm.ac.id>
- Edhy Sutanta (Heriyanto). (2018). *Pengertian dan Definisi Sistem Informasi*. Article: unmaha.ac.id.
- Erawati.(2021). *Rancang Bangun Sistem Informasi Point Of Sale Dengan Framework Codeigniter Pada Cv Power Shop*. Jurnal Comaise. Vol. D4. No. 02.

- Fauzi et.al. (2021). *Perancangan Sistem Informasi Sekolah kejuruan Dengan Menggunakan Metode Waterfall*. Irwanto: jurnal Pendidikan, Vol 12. No.1, Februari.
- Gordon B. Davis. (2013). *Analisis Sistem Widuri Sebagai Media Informasi Pengajaran Dan Tugas Pada Perguruan Tinggi Raharja*. Tangerang: Kiki Amalia.
- Hery. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Comprehensive edition, Pt. Grasindo. Jakarta, hal 202.
- Hutahaean. (2014). *Konsep Sistem Informasi*, Yogyakarta, Deepublish.
- Indrayani Nur. (Rayani Resky Lestari). (2022). *Analisis Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Mamasa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan*. Skripsi. Makassar: Universitas Bosowa.
- Irfani. (2020). *Pengertian Pengelolaan Keuangan*. Article: repository.stei.ac.id
- Kelly. (2011). *Analisis Penyebaran Informasi Di Perpustakaan Dalam Memanfaatkan Media Sosial*. Dakwasifa: journal of da'wah and communication.
- Kurnia Cahya Lestari (Arni Muarifah Amri). (2020). *Pengertian Sistem*. <https://eprints.utdi.ac.id>
- Kristanto. (2021). *Perancangan Sistem Informasi Sekolah Kejuruan Dengan Menggunakan Metode Waterfall*. Irwanto: jurnal Pendidikan, Vol 12. No.1, Februari.
- Marimin. (2020). *Perancangan Sistem Informasi SDM Berbasis Objek pada PT. General Protection And Respond Solution Dengan Menggunakan Metode Rational Unified Process*. Ita Dewi Sintawati: jurnal PROSISKO Vol. 7 No. 1 Maret.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mustika. (2018). *Pengertian Sistem Informasi Akuntansi*. Article: jurnal Vol 13. No. 02.
- Nadya. "Analisis Sistem INFORMASI Akuntansi Penjualan Tunai Dalam Menunjang Efektifitas dan Efisiensi Sistem Pengendalian Internt Pada PT Optik Tunggal Sempurna Cabang Mall Ratu Indah". Economics Bosowa 5.003 (2020): 172-185.
- Nugroho Widijayanto. (2001). *Sistem Indormasi Akuntansi*. (Jakarta: Penerbit Erlangga).

- Nur Indrintora. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta, BPFE. Hal 149.
- Purba et. al. (2021). *Pengertian Pengelolaan Keuangan*. Article: repository.stei.ac.id
- Reni Resiani Sunmaryati. (2019). *Perancangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Berbasis Web Pada Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang*. Skripsi: Tangerang. Universitas Raharja.
- Romney & Steinbart. (2018). *Pengertian Sistem Informasi Akuntansi*. Article: jurnal vol 13. No.02.
- Sutabri. (2020). *Perancangan Sistem Informasi SDM Berbasis Objek pada PT. General Protection And Respond Solution Dengan Menggunakan Metode Rational Unified Process*. Ita Dewi Sintawati: jurnal PROSISKO Vol. 7 No. 1 Maret.
- Sutabri (Yanuardi & Permana). (2018). *Pengertian Informasi*: docplayer. Info/203469505-bab-ii-landasan-teori.html.
- Sutarman. (2013). *Analisis Sistem Widuri Sebagai Media Informasi Pengajaran Dan Tugas Pada Perguruan Tinggi Raharja*. Tangerang: Kiki Amalia.
- Sutarman. (2012). *Analisis Sistem Widuri Sebagai Media Informasi Pengajaran Dan Tugas Pada Perguruan Tinggi Raharja*. Tangerang: Kiki Amalia.
- Sumarsan. (2015). *Evaluasi Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Peraturan Perpajakan Serta Pengaruhnya Terhadap Pajak Penghasilan (PPH) Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Kantor Cabang Manado*: jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15. No. 5.
- Soemarso. (2018). *Pengertian Akuntansi*. <https://journal.ikopin.ac.id>
- Tukino. (2020). *Pengertian Informasi*. <https://ejournal.upbatam.ac.id>
- Turner, Weickgenannt & Copeland. (2017). *Pengertian Sistem Informasi Akuntansi*. Article: eprints.perbanas.ac.id
- Trimio Sujadijaya. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pt Karet Api Indonesia (Persero) Kota Bandung)*. (Bandung: Skripsi Universitas Pasundan).
- Ulfah Salsabila. (2022). *Analisis Penerapan Sistem Perlindungan Pekerja (SMILE) Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabnag Makassar*. Skripsi. Makassar: Universitas Bosowa.

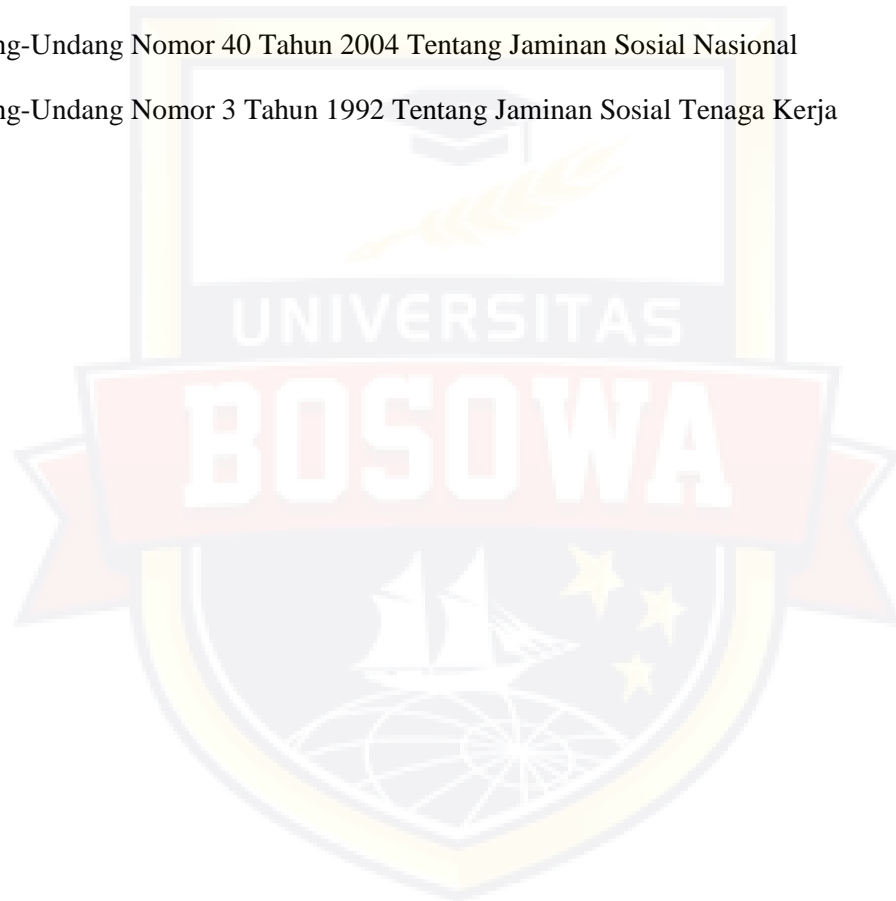
Weygandt, J. J dkk. (2019). *Pengertian Akuntansi*. dailysocial.id/post/pengertian-akuntansi.

Yusniar, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. (2016). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintahan Dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance Dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintahan Aceh)*. Aceh: Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala

<https://www.gramedia.com/literasi/sistem-informasi-akuntansi/> (2021)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan bapak tentang Sistem Informasi?
2. Bagaimana menerapkan sistem informasi yang baik di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar?
3. Apakah menurut bapak sistem informasi akuntansi sangat berpengaruh dalam mengelola keuangan?
4. Sejauh mana menurut bapak tentang penerapan sistem informasi akuntansi dalam suatu perusahaan dalam hal ini di kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar?
5. Apakah selama ini penggunaan sistem informasi akuntansi pada BPJS Ketenagakerjaan dapat memaksimalkan pekerjaan dalam pengelolaan data keuangan?
6. Menurut bapak apa definisi dari tata kelola keuangan?
7. Apa fungsi dan tujuan dari tata kelola keuangan di kantor BPJS ketenagakerjaan?
8. Bagaimana standar laporan keuangan yang diterapkan di kantor BPJS Ketenagakerjaan ini?
9. Menurut bapak bagaimana kualitas laporan keuangan yang ada di kantor BPJS Ketenagakerjaan ini?
10. Apakah dengan adanya sistem informasi akuntansi dapat mempermudah tata kelola keuangan di kantor BPJS Ketenagakerjaan, berikan alasannya?

JAWABAN

Menurut staf karyawan bidang keuangan Bapak Agus Priyetno

1. Menurut saya sistem informasi itu sebuah kumpulan dari beberapa informasi data yang ada dalam satu kesatuan yang membantu perusahaan itu untuk mencapai tujuannya.
2. Sebenarnya sistem informasi akuntansi yang ada khususnya di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu sudah ada standar yang tertuang di dalam aturan manajemen itu sendiri, jadi yang baik itu yang sudah sesuai dijalankan dengan aturan yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, seperti itu.
3. Kalau menurut saya, sangat berpengaruh karena disitu bisa dilihat dari alur proses bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang mulai dari penerimaan iuran, kemudian pembayaran jaminan, dan ada juga pembayaran operasional terkait dengan apa yang dilakukan oleh kantor cabang atau unit itu sendiri.
4. Sejauh ini baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar, karena proses yang ada diunit kerja ini berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya, yang bisa dilihat dari proses pembayaran jaminan yang tidak ada kendala maupun keluhan juga dari tenaga kerja yang datang untuk mendapatkan pelayanan juga aman dan informasi yang tersampaikan itu juga tersampaikan dengan baik.

5. Yang selama ini yang ada di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan adanya sistem informasi akuntansi itu akan mempermudah proses bisnis data keuangan dan akuntansi terkait dengan proses pembuatan laporan keuangan, seperti itu.
6. Kalau dari versi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tata Kelola Keuangan itu seperangkat pedoman yang harus di ikuti oleh sebuah perusahaan untuk memperoleh keputusan atau hasil yang baik yang akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.
7. Berfungsi sebagai aturan agar proses bisnisnya yang ada di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu berjalan dengan baik tidak ada kerugian yang dialami oleh tenaga kerja, karyawan, atau *stake holder* lainnya.
8. Kalau standar laporan keuangan tentunya kita menganut ke *SAK (Standar Akuntansi Keuangan)*, ada buku *SAK* tau kan buku *SAK* nah itu, jadi kalau dari informasi saja kalau di Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu, kita kan ada 5 program, ada jaminan hari tua (*JHT*), jaminan kecelakaan (*JKK*), jaminan Kematian (*JKM*), jaminan Pensiun (*JP*), kemudian jaminan kehilangan pekerjaan (*JKP*) dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu sendiri, kalau untuk jaminan hari tua (*JHT*) kemudian jaminan pensiun (*JP*) itu standar akuntansinya menggunakan *PSAK 18 (Pernyataan Standar Akuntansi)*, kalau dia *JKK*, *JKM*, *JKP*, dia menggunakan *ISAK 35*, kalau operasional atau Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan itu sendiri menggunakan PSAK 1 entitas umum, seperti itu standarnya.

9. Kualitas laporan keuangan di Badan penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu sendiri karena ini perusahaan terbesar tentunya pasti akan kualitasnya itu akan di uji oleh BPK, ada audit dari eksternal kantor pusat yang besar yang termasuk 4 besar, kemudian selain itu, kalau di vabang itu kita akan melaporkan lampiran keuangan itu setiap tanggal 1 ke kantor pusat, seperti itu, jadi kalau di lihat dari kualitasnya pasti akan sudah baik, karena hasil auditnya pun juga dari eksternal yang di publish setiap bulan itu alhamdulillah wajar tanpa kecuali atau wajar tanpa modifikasi sekarang, seperti itu.
10. Adanya sistem informasi akuntansi dengan tata kelola keuangan itu sebenarnya berbanding lurus jadi, dia itu pasti akan mempermudah tata kelola keuangan karena adanya sistem yang di atur dari hulu ke hilir, jadi informasi-informasi terkait akuntansi, jurnal-jurnal, posting, neraca dan laporan itu pasti akan mempermudah tata kelola yang dimana seperangkat atau pedoman ini akan digunakan untuk pengambilan keputusan manajemen itu sendiri atau *stake holder* kedepannya, seperti itu.

JAWABAN

Menurut staff karyawan bidang keuangan Bapak Guritno Adhi Prabowo

1. Pandangan saya terhadap terhadap sistem informasi itu setiap perusahaan wajib untuk memiliki sistem informasi karena sistem informasi di sebuah perusahaan itu memiliki fungsinya untuk mengontrol atau meminimalisir resiko-resiko yang ada disebuah perusahaan, jadi sistem informasi juga dapat memengaruhi pengambilan keputusan para struktural atau para atasan memangku kepentingan.
2. Sistem informasi yang baik di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar menurut saya, secara umumnya bisa dilakukan oleh kepala bidang keuangan di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar yang tiap bulannya biasa dibuat dengan nama laporan analisis manajemen itu berisi informasi-informasi dimana strategi-strategi serta apa yang telah dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar yang dirangkum menjadi laporan analisis manajemen.
3. Menurut saya, Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh dalam mengelola keuangan, karena dimana laporan akuntansi itu atau pembukuan sebuah perusahaan itu tidak baik maka akan sulit untuk menentukan pencatatan, contohnya pendapatannya, karena perusahaan itu pasti mencari keuntungan, nah informasi akuntansi itulah yang bisa menunjukan terkait pendapatan itu.
4. Menurut saya, tentang penerapan sistem informasi akuntansi di mana saya bekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang

Makassar belum terlalu digunakan, karena di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar tidak mengelola secara utuh pembukuan akuntansi, karena yang melakukan pembukuan akuntansi secara utuh itu ada di kantor pusat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

5. Yang saya tau, sistem informasi akuntansi pasti ada di gunakan di kantor pusat kami, yang saya tau karena itu akan berpengaruh terhadap pengelolaan dana di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jadi, masing-masing programpun kami ada, kebetulan sekarang ada 5 program yaitu JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP itu masing-masing punya laporan keuangan sendiri. Jadi, itu pasti sistem informasi akuntansi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan itu digunakan secara maksimal di sana.
6. Kalau definisi menurut saya, sederhana aja sih, seni dalam mengelola keuangan aja.
7. Fungsi dan tujuannya itu tergambar dari strategi utama dari kita yang baru dari direksi kita yang baru itu efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, jadi dalam mengelola keuangan kita harus efektif dan efisien.
8. Sesuai dengan aturan yang berlaku, PSAK dan yang berlaku di indonesia.
9. Kalau menurut saya, kualitas laporannya sudah baik, karena setiap tahunnya itu diaudit oleh kantor auditor independen dan memiliki laporan yang baik wajar tanpa modifikasi.
10. Jawabannya iya, pasti alasannya karena, apa ya, informasi akuntansi itu akan mempengaruhi terhadap, jadi seorang pemimpin struktural keuangan itu bisa

mengambil sebuah keputusan, jadi kalau informasi akuntansi itu dapat mempermudah tata kelola keuangan itu pasti.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Melaksanakan Penelitian

UNIVERSITAS BOSOWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jalan Urip Sumaharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231
 Telp. 0411-452-901 - 452-789 Ext. 125, Faks. 0411-424-568
<http://www.univerutabosowa.ac.id>

Nomor : A/363/FEB/UNIBOS/III/2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian & Pengambilan Data


Kepada Yth,
 Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar
 Di
 Tempat

Dengan Hormat bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa kami Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

No	Nama/Stambuk	Judul	No Hp
1	Aunilah Azzahrah 4519013048	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Tata Kelola Keuangan Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar	083153479251

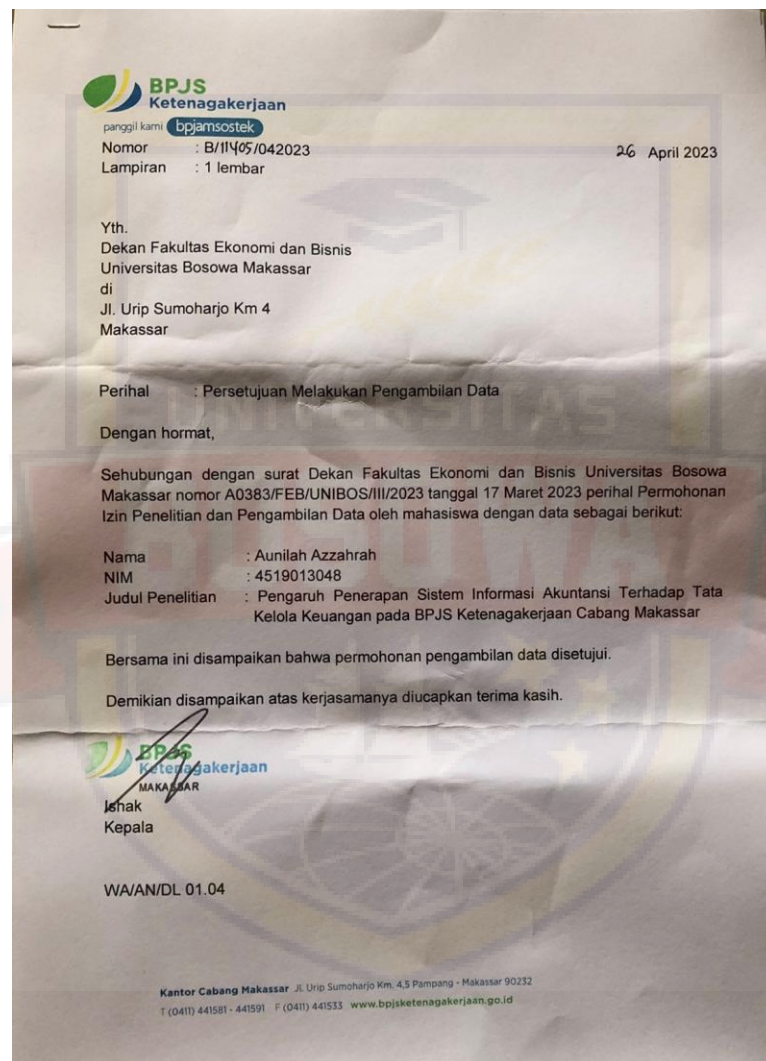
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian dan pengumpulan data di tempat bapak/ibu pimpin.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 17 Maret 2023
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., MM
 NDS. 09 2412 680

Lampiran 2

Surat Telah Menyelesaikan Penelitian Kantor Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Cabang Makassar



Lampiran 3

Wawancara bersama staff /karyawan Bidang Keuangan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar Bapak Agus Priyetno.



Lampiran 4

Wawancara bersama staff /karyawan Bidang Keuangan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan cabang Makassar Bapak Guritno Adhi Prabowo.

